

SKRIPSI

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH
DI DESA TEKASIRE KECEMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan



OLEH:

IRDIANSYAH
NIM: 217130090

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH
DI DESA TEKASIRE KECEMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020**

Oleh:

IRDIANSYAH
NIM 217130090

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal, 4 Juli 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si
NIDN. 0825038303



Hidayatulah, S.IP.,M.IP
NIDN. 0809038902

Ketua Program Ilmu Pemerintahan



Ayatollah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH
DI DESA TEKASIRE KECEMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan oleh

IRDIANSYAH
NIM: 217130090

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal 4 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si** (PU) 
NIDN. 0825038303
2. **Hidayatulah, S.IP.,M.IP** (PP) 
NIDN. 0809038902
3. **Amin Saleh, S.Sos.,M.I.Kom** (PN) 
NIDN. 0831128310

Ketua Program Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan doktor) baik di universitas muhammadiyah mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumua dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telas telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupah pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya ini, serta sanksi lainyasesui dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 04 Juli 2021



IRDIANSYAH
NIM. 217130090



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irdiansyah.....
NIM : 217130090.....
Tempat/Tgl Lahir : Jati Baru - 06-09-1996.....
Program Studi : Ilmu Pamarintahan.....
Fakultas : FISIPOL.....
No. Hp/Email : 085.338.261.255 / irdiantan96@gmail.com
Judul Penelitian : -

Upaya Peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di desa tetrasira kecamatan manggetawa kabupaten dompu tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Penulis



Irdiansyah
NIM. 217130090

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Urdiansyah
NIM : 217130090
Tempat/Tgl Lahir : Jati Baru - 06-09-1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 338 261 255 / urdiantang69@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di Desa Kakasira Kecamatan Manggajawa Kabupaten Dempu tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Penulis



Urdiansyah
NIM. 217130090

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

HALAMAN PEREMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas segala nikmat dan karunianya karya ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam haturkan kepada nabi muhammad saw atas petunjuk dan keteuladanannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini dipersembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Kaka, adik, sahabat, khususnya keluarga besarku yang aku sayangi, yang telah abrah memimbing dan memberikan kasi sayngnya yang tidak terkira. Rekn-rekan seperjuanganku, program studi ilmu pemerintahan, dan serta almamater tercintaku universitah muhammadiyah mataram.

Demikian persemahan sederhana yang dapat disajikan, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis.



MOTTO

- ❖ Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian.
- ❖ Sengatlah dalam merai cita-cita untuk mendapatkan keinginan yang sudah kita impikan.



ABSTRAK

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH DI DESA TEKASIRE KECEMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah di desatekasire kecamatan manggelewa kabupaten dompu. Pada penelitian ini keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat desa serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus.

Penelitian ini mengacu pada teori Steers Gunawan (2017), bahwa Kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang menyangkut keterampilan, pendidikan latihan dan pengalaman. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus dilakukan dengan dua cara yaitu Pembinaan disiplin aparat dan pendidikan dan pelatihan. peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi terdapat beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat meningkatkan kemampuan aparat desa dengan melakukan serta memberikan pembinaan disiplin aparat dan pendidikan juga pelatihan rutin terhadap aparat desa setiap dua kali dalam setahun. Selain itu, pemerintah desa/kepala desa menyediakan Fasilitas lengkap bagi aparatur untuk mendukung kecepatan pekerjaannya. Fasilitas tersebut seperti menyediakan internet gratis dengan kecepatan tinggi, computer, wifi, juga printer.

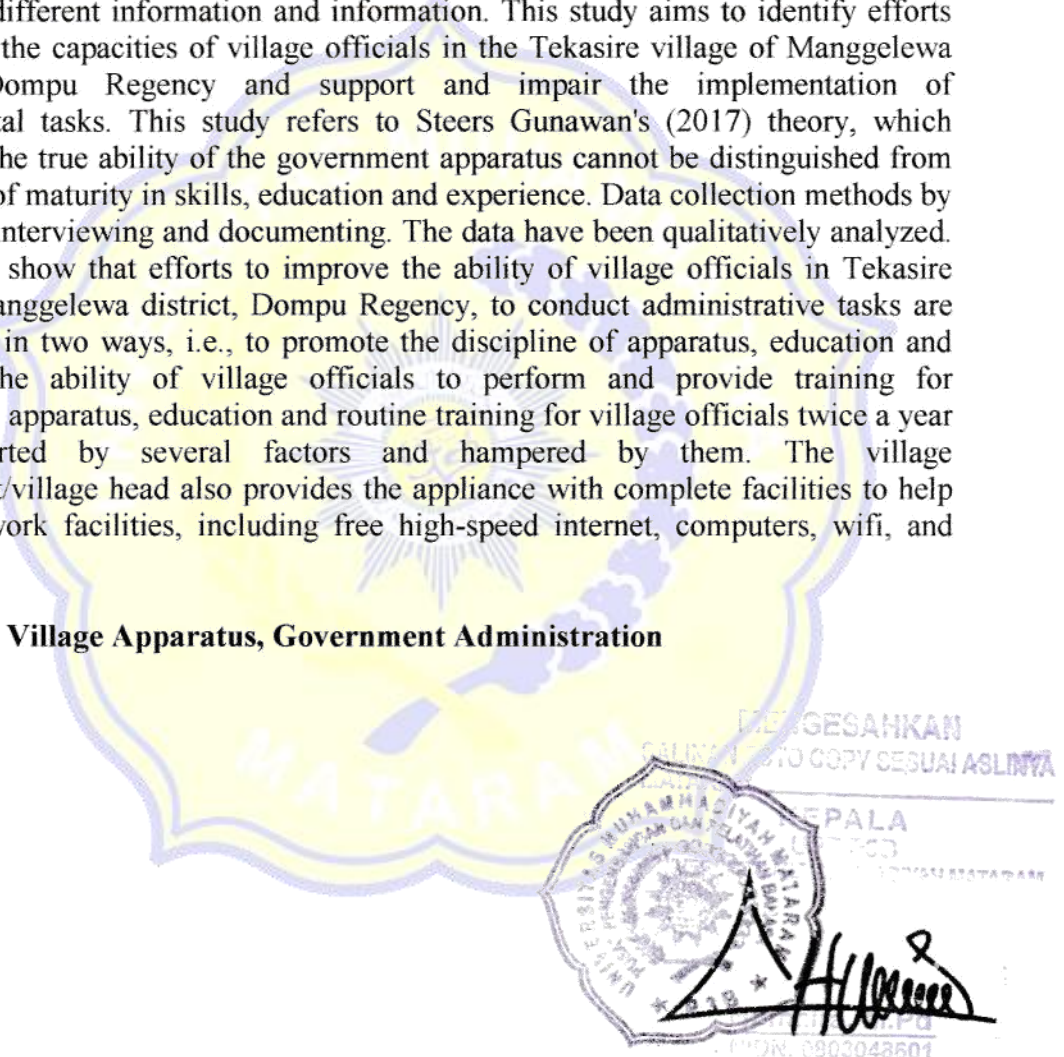
Kata Kunci: *Administrasi, Pemerintah, Aparat Desa*

ABSTRACT

THE EFFORTS TO INCREASE THE CAPABILITY OF VILLAGE APPLIANCES IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE TASKS IN TEKASIRE VILLAGE, MANGGELEWA DISTRICT DOMPU REGENCY IN 2020

This research was done in Tekasire village, Manggelewa district, Dompus Regency, to find ways to build village officials' capacity to perform government administrative tasks. Due to the fact they know all the conditions and problems in their area as the lowest governmental body. This study requires the sub-district government to contribute different information and information. This study aims to identify efforts to enhance the capacities of village officials in the Tekasire village of Manggelewa District, Dompus Regency and support and impair the implementation of governmental tasks. This study refers to Steers Gunawan's (2017) theory, which states that the true ability of the government apparatus cannot be distinguished from discussion of maturity in skills, education and experience. Data collection methods by observing, interviewing and documenting. The data have been qualitatively analyzed. The results show that efforts to improve the ability of village officials in Tekasire Village, Manggelewa district, Dompus Regency, to conduct administrative tasks are undertaken in two ways, i.e., to promote the discipline of apparatus, education and training. The ability of village officials to perform and provide training for disciplinary apparatus, education and routine training for village officials twice a year are supported by several factors and hampered by them. The village government/village head also provides the appliance with complete facilities to help speed its work facilities, including free high-speed internet, computers, wifi, and printers.

Keywords: Village Apparatus, Government Administration



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah penulisan proposal ini dan segala kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal yang berjudul **“Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desatekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2020”** tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulisan Proposal ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing satu yang telah membimbing dan mengarahkan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Hidayatulah, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing dua yang telah membimbing dan mengarahkan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Umumnya Dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis sebagai manusia biasa luput dari kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu apabila terdapat kekurangan dalam Penulisan proposal ini, baik dari segi penyajian isi maupun tata bahasa, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

Mataram, 13 Januari 2021

Penulis

IRDIANSYAH
NIM. 21713009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSEUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO HIDUP	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tujuan Pustaka	13
2.2.1 Konsep Kemampuan Aparat Desa	13
2.2.2 Konsep Administrasi Pemerintah Desa.....	17
2.3 Admintrasi.....	18

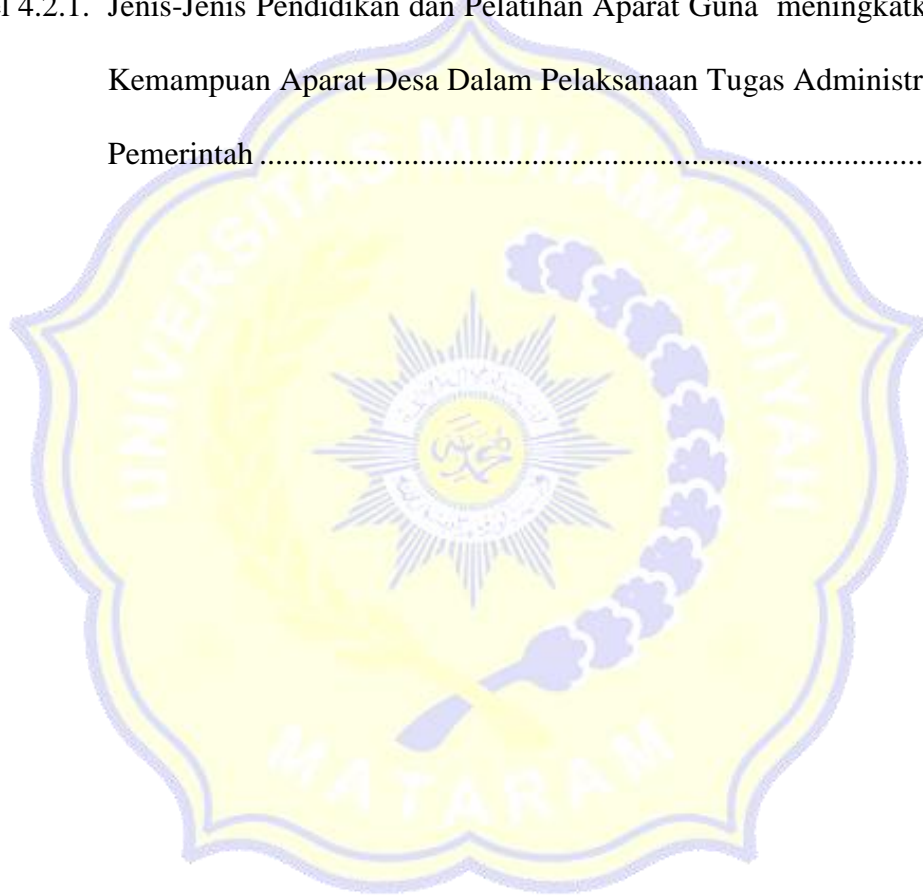
2.3.1	Pengertian Administrasi	18
2.3.2	Ruang Lingkup dan Asas Administrasi Pemerintahan.....	20
2.4	Kerangka Pikir	21
2.5	Definisi Konseptual.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Lokasi Penelitian.....	23
3.3	Waktu Penelitian	24
3.4	Tehnik penentuan Narasumber	24
3.5	Jenis Data	24
3.5.1	Data Primer	28
3.5.1	Data Skunder	25
3.6	Tehnik Pengumpulan Data.....	25
3.7	Tehnik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		28
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.1.1	Letak dan Kondisi Geografis	28
4.1.2	Hidrologi	29
4.1.3	Kondisi Demografis	29
4.1.4	Struktur Organisasi	30
4.2	Hasil dan Pembahasan	31
4.2.1	Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah di desa tekasire kecamatan manggelewa kabupaten dompu tahun 2020.....	31

1. Upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah di desa tekasire kecamatan manggelewa kabupaten dompu tahun 2020	35
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah di desa tekasire kecamatan manggelewa kabupaten dompu tahun 2020	47
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2. Definisi operasional	22
Tabel 3.1. Narasumber Penelitian	24
Tabel 4.1.1. Data kependudukan desa tekasire tahun 2021	28
Tabel 4.2.1. Jenis-Jenis Pendidikan dan Pelatihan Aparat Guna meningkatkan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4: Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1.4: Struktur Orgnisasi Pemerintah Desa Tekasire	30
Gambar 4.2.1: Proses Pemberian Reward Kepada Aparat.....	40
Gambar 4.2.1: Proses pendidikan dan pelatihan aparat desa tekasire.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara filosofis, Desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam proses. Di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa berkembang dengan berbagai cara sehingga perlu dilindungi dan dilindungi. Kekuasaan yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis meletakkan dasar yang kokoh bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik dalam tata cara pemilihan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan subsistem dari departemen pemerintahan pusat yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah bupati. Sebagai garda depan sistem pemerintahan daerah, desa akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan

diputuskan oleh pemerintah rakyat dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 membawa semangat baru bagi proses demokrasi di tingkat desa. Ciri demokrasi adalah bahwa semua elemen (partisipasi) warga negara berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus, Pasal 54 UU Desa mengatur tentang partisipasi warga, di mana seluruh elemen masyarakat menjadi bagian terbesar dalam musyawarah dalam keputusan strategis (BPD) yang terjadi di desa.

Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas di bidang pemerintahan menempati tempat yang sangat penting, karena sebagai instansi pemerintahan terendah, mereka sangat mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di daerah. Desa sering digunakan untuk perencanaan wilayah, sehingga data buatan atau data informasi harus dihindari karena akan menghambat tujuan negara.” Semakin membutuhkan kerja keras dan kemampuan yang lebih baik untuk mendorong kepatuhan terhadap tanggung jawab pemerintah (Gunawan, 2017: 34).

Selain itu, pengelolaan pembangunan negara yang multidimensi melibatkan seluruh aparatur pemerintah di tingkat pusat dan daerah bahkan di tingkat desa. Komponen atau perangkat yang dimaksud harus memiliki kemampuan terbaik untuk menjalankan fungsinya. Mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang sangat menentukan keberhasilan upaya pembangunan negara

secara menyeluruh, maka sudah sepatutnya wilayah desa dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Bahctiar, 2019: 96).

Mengingat kompleksnya wilayah atau ladang yang akan dikembangkan oleh pemerintah akar rumput, salah satu bidang yang pertama kali dikembangkan adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, serta penguatan komunitas dan masyarakat. institusi. partisipasi dan aspek lainnya. Hal ini sangat penting karena pemerintah desa dan lembaga-lembaganya merupakan penyelenggara utama penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, serta sebagai pembangun ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.

Keberadaan perangkat desa juga disertai tugas bidang pemerintahan, menempati posisi yang sangat penting, karena sebagai lembaga pemerintahan terendah, mereka sangat mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di daerah, sehingga harus mandiri. . dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah kecamatan Jenis informasi dan informasi, kebutuhan umum untuk pembangunan daerah dan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat de Basron Bahctiar (2019) mencatat bahwa “Desa digunakan sebagai bahan informasi dan sumber data. Informasi dan informasi yang diperoleh dari desa sering digunakan dalam perencanaan wilayah. Oleh karena itu, data manual atau data informasi sebaiknya dihindari, karena dapat menghambat tujuan nasional” (Basron Bahctiar, 2019: 96).

Oleh karena itu, kader desa semakin membutuhkan kerja keras dan keterampilan terbaik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi yang diperlukan, untuk meningkatkan kinerja tugas pemerintahan.

Menggabungkan kondisi sementara Desa Tekasire di Kabupaten Dompu Kecamatan Manggelewa sebagai lokasi penelitian yang direncanakan, pengamatan awal penulis menunjukkan bahwa perangkat desa mampu menjalankan tugasnya, dan hasilnya masih kecil atau belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas pemerintahan yang belum dilaksanakan secara utuh dan konsisten sesuai dengan ketentuan administrasi umum, administrasi kependudukan, dan administrasi keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2020”** dengan harapan memperkaya literatur, pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang di ajukan adalah:

1. Bagaimana upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kemampuan aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa

Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kemampuan aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan yang memadai kepada aparatur desa tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa pada umumnya dan register Desa pada khususnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi penelitian pada umumnya tentang upaya peningkatan kemampuan aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam hal ini pemerintah Desa terutama aparatur Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa seyogianya mempunyai inisiatif, untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan administrasi Desa.
- b. Bagi teman-teman mahasiswa dengan adanya penelitian ini tentu dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya selain itu memberikan pemahaman kepada aparatur Desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintah Desa agar pelaksanaan penyelenggara pemerintah Desa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat setempat.
- c. Bagi peneliti sebagai bahan acuan untuk dikembangkan peneliti dalam rangka memperluas pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan administrasi Desa.

1.4.3 Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Dahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

1. Basron Bachtiar (2019) dengan judul "*Upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa*" dalam urainnya, peneliti tersebut menjelaskan bahwa kemampuan aparat Desa Terate dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal.
2. Made Sulandra dan Nyoman Mudarya (2018), dengan judul "*Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa*", hasil urainnya peneliti tersebut menjelaskan bahwa Kemampuan perangkat/aparat pemerintahan Desa Pemuteran dalam pelaksanaan tugas administrasi masih rendah. Terlihat pada bukti-bukti yang dapati

dilapangan, masih banyak buku-buku untuk pencatatan kearsipan tidak terisi. Selain dari pada itu, Masih ditemukannya kurang disiplin aparat desa dalam mematuhi/mentaati jam masuk kantor tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

3. Mohamad Helmi Syafudin, Afifuddin, dan Roni Movinganto Widodo (2019) berjudul “Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan.” Peneliti menjelaskan bahwa upaya peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Malang Kabupaten desa dilakukan dengan dua cara yaitu penguatan disiplin kerja kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Penerapan disiplin instrumen di Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang merupakan pengembangan dari disiplin jam kerja, karena ketepatan jam kerja erat kaitannya dengan disiplin lain.
4. Muh. Fachri Arjad (2018) dengan judul “*Peranan aparat Desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Desa karyamukti kecamatan Mootilango kabupaten Gorontalo*” menjelaskan bahwa pertama, peranan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Karyamukti Kcamatan Mootilango kabupaten Gorontalo masih kurang maksimal. Penilaian tersebut karena dari tiga kepala urusan, baik pemerintahan, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya

peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di desa karyamukti yaitu Disiplin kerja, pendidikan dan latihan, sarana dan prasarana serta tingkat kesejahteraan aparat pemerintah desa.

5. Moh. Dahlan (2016) dengan judul “Kemampuan aparat Desa dalam mengelola potensi badan usaha milik desa (BUMDES) di kabupaten Kartanegara” menjelaskan bahwa Kemampuan aparat desa dalam mengelola potensi bumdes di wilayah perkotaan tinggi dalam penerapan asas dan komitmen dan perencanaan namun masih lemah dalam monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan. Sedangkan kemampuan aparat desa di wilayah pesisir tinggi dalam perencanaan namun masih lemah.

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Basron Bachtiar (2019)	“Upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa” (studi kasus di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Utara)	Kemampuan aparat Desa Terate dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik	Variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian memiliki kesamaan dan memiliki keyakinan penuh terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri.

			administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.	
2.	Made Sulandra dan Nyoman Mudarya (2018)	<i>“Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa”</i>	Kemampuan perangkat/aparat pemerintahan Desa Pemuteran dalam pelaksanaan tugas administrasi masih rendah. Terlihat pada bukti-bukti yang dapat dilapangan, masih banyak buku-buku untuk pencatatan kearsipan tidak terisi. Selain dari pada itu, Masih ditemukannya kurang disiplin aparat desa dalam mematuhi/mentaati jam masuk kantor tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan.	Secara umum dalam pembahsannya terdapat variabel penelitian yang sama, dimana variabel tersebut membahas tentang kebijakan
3.	Mohamad Helmi Syafudin, Afifuddin, dan Roni Pindahanto Widodo (2019)	<i>“Upaya peningkatan kemmpuan aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi”</i>	upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta 56 melakukan pendidikan dan pelatihan. Adapun bentuk penerapan disiplin aparatur Desa Baturetno Kecamatan Singosari	Penelitian memiliki kesamaan fokus, yaitu penelitian pada dasarnya menyangkut upaya-upaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan pada akhirnya mengacu pada kebijakan pemerintah.

			Kabupaten Malang adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya.	
4.	Muh. Fachri Arjad (2018)	<i>Peranan aparat Desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Desa karyamukti kecamatan Mootilango kabupaten Gorontalo”</i>	menjelaskan bahwa pertama, peranan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango kabupaten Gorontalo masih kurang maksimal. Penilaian tersebut karena dari tiga kepala urusan, baik pemerintahan, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di desa karyamukti yaitu Disiplin kerja, pendidikan dan latihan, sarana dan prasarana serta tingkat kesejahteraan aparat pemerintah	Ada kesamaan dalam metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Selain itu, secara umum penelitian ini membahas hal-hal seperti usaha.

			desa.	
5.	Moh. Dahlan (2016)	<i>“Kemampuan aparat Desa dalam mngelolah potensi badan usaha milik desa (BUMDES) di kabupaten Karta Negara</i>	Kemampuan aparat desa dalam mengelolah potensi bumdes diwilayah perkotaan tinggi dalam penerapan asas dan komitmen dan perencanaan namun masih lemah dalam monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan. Sedangkan kemampuan aparat desa diwilayah pesisir tinggi dalam perencanaan namun masih lemah.	Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu kebijakan pemerintah itu sendiri.

Dari urain beberapa penelitian terdahulu diatas, dengan penelitian yang akan diteliti terdapat kesamaan dari beberapa aspek dan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni, terdapat kesamaan dari objek penelitian dan contoh kasus yang akan diteliti. Selain dari pada itu, Metodologi yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode pendekatan deskripsi kualitatif.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Konsep Kemampuan Aparat Desa

Istilah “Kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam Gunawan (2017:38), berpendapat bahwa “Kemampuan Dalam perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipesaratkan sesuai kondisi yang diharapkan “Sementara itu, menurut Kartono dalamGunawan (2017:38), bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan

keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota bisa.

Lebih lanjut, beberapa jenis kemampuan yang di antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijak sana mengambil keputusan, kepemimpinan masyarakat, dan pengetahuan tentang pekerjaan. Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut diatas, dalam suatu organisasi pemerintah desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan pengimpletasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau hasil kemampuan kerjanya.

Konsisten dengan kemampuan Chaplin dalam Mohamad Helmi Syaifuddin dkk. (2019), kemampuan, kesanggupan, ketangkasan, bakat, dan kesanggupan adalah daya untuk melakukan tindakan. Pada saat yang sama, menurut kemampuan Robbins, kemampuan bawahan mungkin bawaan, atau mungkin hasil dari pelatihan atau latihan. Menurut Akhmat Sudrajat, ada pandangan lain yang menghubungkan istilah keterampilan dan kemampuan (Mohamad Helmi Syaifuddin et al., 2019: 53).

Menurut Tjiptoherianto de Gunawan (2017: 39), kapasitas kerja seseorang menunjukkan bahwa kapasitas kerja yang rendah merupakan akibat dari pendidikan, pelatihan dan kesehatan yang buruk. Sementara itu, menurut Steers de Gunawan (2017: 39), kapasitas instansi pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembahasan tentang kematangan

kelembagaan, termasuk keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan dan pengalaman.

Menurut Tracey, seperti yang dikutip oleh Wahjosumidjo menjelaskan bahwa ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehinggatercapai hasil yang maksimal, yaitu:

1. Technical skill yaitu kecakapan spesifik tentang proses, prosedur, atau teknik-teknik yang merupakan kecakapan khusus dalam menganalisis hal-hal yang khusus.
2. Human skills menunjukkan keterampilan dengan orang atau Manusia. Human skills yaitu kecakapan pemimpin untuk bekerja secara efektif dengan anggota kelompok yang dipimpinnya.
3. Conceptual skill yaitu kemampuan pemimpin melihat organisasi sebagai satu keseluruhan.

Sementara itu, menurut Steers dalam Gunawan (2017), bahwa Kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparatur dapat dilihat dari tingkatan pendidikan aparatur, jenis latihan yang pernah diikuti dan penggalaman yang dimilikinya, secara konsepsional hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidetifikasi apakah kegiatan dalam organisasi dapat

mencapai tujuannya salah satunya yang harus dapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparatur desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kommitif warga desa sering kali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang jelas dengan semangat perubahan ketikan berbenturan dengan kebijakan seorang kepala desa (kondisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh lemahnya human resources di desa yang populasinya relatifnya kecil dan sangat terbatas sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bembuka atau saling berkerja (Gunawan, 2017:40).

Pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tengtra dan keadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan

perubahan baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar” makin mengarah pada praktker good governace (Gunawan, 2017: 41).

2.2.2 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sebelum menjelaskan konsep administrasi pemerintahan, terlebih dahulu dijelaskan tentang administrasi dan pemerintahan Menurut Siagian (1991:2), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah dibuat, dan pelaksanaannya pada umumnya dilakukan oleh dua orang. . Atau lebih banyak orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dewasa ini, peran pemerintah desa tetap dipertahankan sebagai struktur perantara, yaitu sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa, bahkan ada fungsi lain yaitu sebagai agen. Desa. pembaruan atau peran serupa lainnya. Menurut Konstitusi, hal itu mendapat perhatian khusus. Atas nama pembina, berbagai bentuk perubahan sosial terencana diperkenalkan dan dilaksanakan melalui pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa.

Pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya dengan perkataan lain perubahan sosial yang terjadi pada UUD No. 32 thn 2004 adalah guna memodernisasikan pemerintah desa agar mampu menjalankan tiga perana utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayana masyarakat serta ageng pembaharuan sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan

forma politik dan serta sistem pemerintahan harus ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan perundang undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur desa. Informasi yang diregulasi oleh UUD No. 5 thn 1979 selama dua dekade, direformasi melalui UUD No. 22 thn 1999 yang memberikan peluang kehidupan lebih demokrasi pada tatara struktur pemerintah paling depa tersebut. Dengan diterapkannya UUD No. 32 thn 2004 tentang pemerintahan desa diharapkan akan semakin menggempurnakan pada dikma penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerinitah No. 72 thn 2005 tentang desa sebagai pengganti peraturan pemerintah No 72 thn 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa sebagai regulasi yang mengatur tentang desa setelah setahun berlakunnya UUD No. 32 thn 2004.

2.3 Administrasi

2.3.1 Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yang merupakan kata kerja yang berarti melayani, membantu, mendukung atau mencapai. Istilah tersebut berasal dari pengelolaan kata benda dan pengelolaan kata sifat (Mohamad Helmi Syaifuddindkk, 2019: 53).

Bagi Indonesia, istilah administrasi sudah tepat. Rangkaian kegiatan yang tergolong administratif meliputi: Pertama, dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih). Keduanya terjadi dalam kerjasama. Ketiga,

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga faktor tersebut di atas merupakan tanda pengenal atau ciri-ciri manajemen, jika disingkat faktor-faktor tersebut adalah sekelompok orang, kerjasama dan tujuan tertentu.

Manajemen diartikan sebagai proses pengorganisasian prosedur kerja, atau dengan kata lain proses pelaksanaan kegiatan secara teknis. Manajemen adalah serangkaian tindakan di mana sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga merupakan proses pengorganisasian kegiatan untuk melaksanakan rencana/keputusan yang telah dibuat, mengorganisasikan pekerjaan dan membimbing orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut (Mohamad Helmi Syaifuddin et al., 2019: 53).

Manajemen juga didefinisikan sebagai proses dimana semua kegiatan dilakukan secara keseluruhan. Kegiatan tersebut didasarkan pada tujuan atau alasan tertentu dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 1 ayat 1 administrasi pemerintahan adalah tatalaksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Atau administrasi pemerintahan pada pasal 2 dimaksud sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkaitan

dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

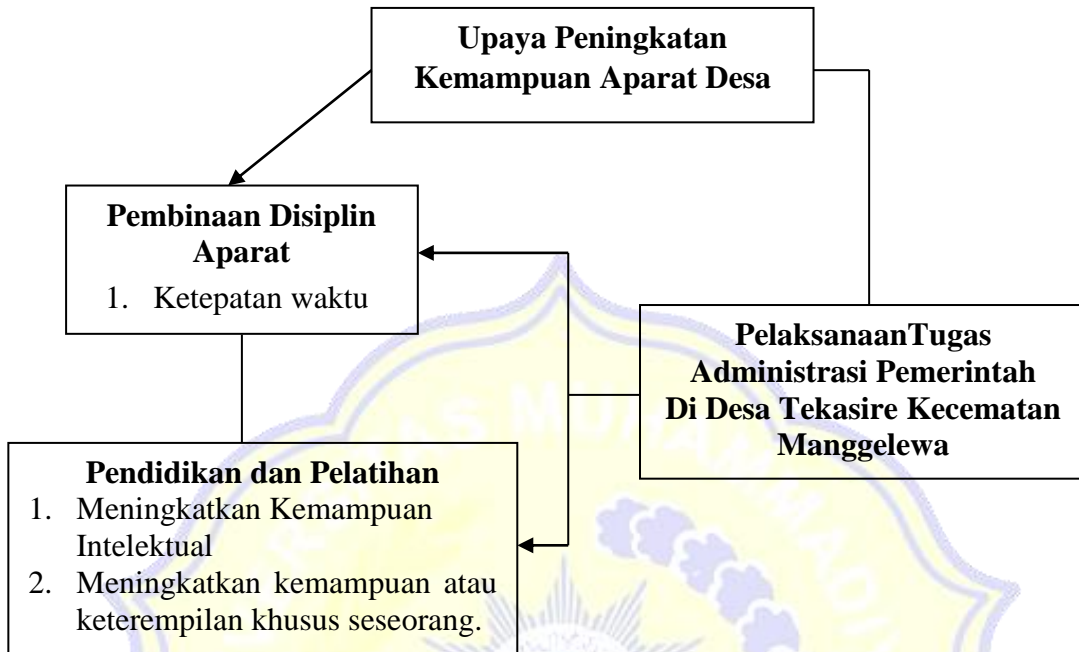
2.3.2 Ruang Lingkup dan Asas Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan pada Pasal 4 meliputi semua aktifitas sebagai berikut:

- a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
- b. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;
- d. Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan undang-undang dasar RI 1945 dan/atau undang-undang.
- e. Pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

2.4 Kerangka Pikir

Tabel 2.4
Kerangka Pikir



Sumber: Tjiptoherianto (1993)

2.5 Definisi Konseptual.

1. Dalam meningkatkan admintrasi desa, pemerintah desa dapat menyediakan sarana dan prasarana admintrasi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan pedoman tehnik dalam pelaksanaan adalah salah satu upaya dalam meningkatkan admintrasi desa.
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan admintrasi desa.
4. Memperhatikan dan meningkatkan kualitas perkerjaan yang di hasilakan sesuai di harapkan.
5. Menyediakan kebutuhan pendukung sesuai dengan keperluan sarana admintrasi desa. Dengan adanya sarana yang lengkap akan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.

6. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan kader desa dalam melaksanakan tugas administrasi adalah pembentukan disiplin instansi. Faktor kedisiplinan yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin mengenai ketepatan dan tuntutan masing-masing tim dalam waktu yang ditentukan dalam setiap hari kerja.
7. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan kader desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya pemberdayaan mesin, terutama untuk meningkatkan kecerdasan kepribadian manusia. Pendidikan dalam proses pengembangan kompetensi bertujuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sumber Data
1	Pembinaan Disiplin Aparat	1. Ketepatan waktu	a. Skunder b. Primer
2	Pendidikan dan Pelatihan	1. Meningkatkan Kemampuan Intelektual 2. Meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.	a. Skunder b. Primer
3	Melakukan Bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan Admintrasi Desa.	1. Memberikan pedoman tehnik dan bimbingan khusus dalam pelaksanaan admintrasi desa. 2. Melakukan supervise admintrasi untuk mengetahui kinerja serta kelengkapan arsip laporan. 3. Melakukan konsultasi secara langsung dapat memastikan kinerja admintrasi untuk melakukan pembinaan.	a. Skunder b. Primer

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan fenomena lain yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha melihat kebenaran atau membuktikan kebenarannya, tetapi ketika melihat kebenarannya saja tidak cukup dengan melihat yang sebenarnya, tetapi terkadang juga perlu melihat hal-hal yang tersembunyi dan harus melampaui kenyataan untuk diselidiki. Hal yang nyata (Moleong, 2007). 2018: 6).

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami situasi seseorang dan masalah-masalah dunia nyata yang mendetail, serta untuk lebih memahami semua fenomena yang belum diketahui secara luas. Jenis investigasi ini dinilai sangat efektif karena secara kualitatif menggambarkan keadaan objek yang ada saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari investigasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2021.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih satu bulan mulai pada bulan Maret samapai 15 Juni 2021.

3.4 Tehnik Penentuan Narasumber

Sugiyono (2018) percaya pada penelitian kualitatif bahwa teknik pengambilan sampel yang sering digunakan adalah pengambilan sampel yang disengaja, dan pengambilan sampel yang disengaja mengacu pada teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus tersebut dianggap, misalnya, individu atau subjek lebih mengetahui harapan peneliti, sehingga peneliti dapat lebih mudah memperoleh informasi atau situasi dalam penelitian.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Yan SofianHerali	KepalaDesa
2	Nasution	Sekretaris
3	Abdul MajidS.Pd	KasiPemerintahan
4	AbdurahmanS.Pd	KaurKesra
5	Supardin Ahmad	KasiPelayanan
6	NurjaenabS.Pd	KaurKeuangan
7	Ida Royani	Kaur Tata Usaha
8	SitiRaodah	StafPemerintahan
9	SitiRamlahS.Pdi	StafKeuangan
10	MuhamaadRisfan	Masyarakat
11	AlimudinRasid	Masyarakat
12	Rohayu	Masyarakat

3.5 Jenis Data

Sugiyono (2014) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data bersumber dari data primer dan data skunder.

3.5.1 Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dari mana data dihasilkan, dan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Ini merupakan sumber data bagi tokoh masyarakat di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dan sumber data lainnya yang mungkin peneliti perlukan untuk mempermudah pencarian data di lapangan.

3.5.2 Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data tersebut merupakan data bantu. Seperti halnya survei data lainnya, sumber data sekunder diharapkan dapat membantu menemukan data yang diharapkan, seperti dokumen, undang-undang, arsip, dan data lain yang diperlukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara mengamati peristiwa, suatu kejadian, dan bagaimana hal-hal tertentu terjadi. Observasi juga merupakan metode dasar untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini mengadopsi observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti tiba di lokasi kegiatan pengamat, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

3.6.2 Wawancara/Interview

Teknik wawancara semacam ini adalah wawancara mendalam, yang lebih bebas diterapkan daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan masalah, lebih terbuka, dan meminta pendapat dan ide dari semua pihak yang diundang untuk wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan aparat desa dan berbagai kalangan masyarakat untuk memperoleh informasi yang detail berdasarkan situasi yang ada.

3.6.3 Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui catatan tertulis dan data arsip, seperti catatan harian, file foto, hasil rapat, event log, dll. Dalam hal ini, dokumentasi juga sangat penting untuk membantu penyidik mengumpulkan sumber data dan bukti pendukung yang sebenarnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif Bogdan dan Biklen Moleong (2018: 280) adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data dengan data, mengelompokkannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, dan menemukan hal-hal yang penting. Anda mempelajari dan memutuskan apa yang akan Anda katakan kepada orang lain.

Adapun Proses analisis data dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dapat dilakukan melalui abstraksi. Abstraksi merupakan upaya untuk meringkas proses-proses utama dan pernyataan-pernyataan yang harus dipertahankan agar tetap berada dalam data penelitian.

3.7.2 Penyajian Data

Representasi data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa data yang diperoleh dalam proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data adalah untuk dapat melihat keadaan umum. Pada tahap ini, peneliti mencoba menyajikan data berdasarkan masalah utama.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti mencoba mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, menganalisis data, dan kemudian menarik kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan bertujuan untuk memadatkan semua informasi dari data yang ada ke dalam bentuk yang lebih singkat dan mudah dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.